

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah maka pemerintah daerah harus membuat dan menyajikan laporan keuangan. Aturan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk memberikan transparansi anggaran kepada masyarakat luas.

Setiap tahunnya, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) akan menerima hasil kajian berupa rekomendasi dari BPK (Badan Pengawas Keuangan). Berdasarkan faktor-faktor seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan yang memadai (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efisiensi sistem pengendalian internal, opini adalah bagian dari pernyataan profesional pemeriksa mengenai kelengkapan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK melakukan audit setiap tahunnya, kemudian dari hasil audit tersebut BPK memberikan beberapa macam opini yang di mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan

opini (*disclaimer of opinion*). Dijelaskan bahwa Laporan Keuangan yang disusun disajikan secara wajar dan mutu apabila LKPD yang disusun mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Akibatnya, setiap daerah berupaya untuk mendapatkan reduksi WTP dari BPK.

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi terdapat masalah yang berkaitan dengan opini audit BPK. Sebelum tahun 2019 laporan keuangan pada Kabupaten Sarmi selalu mendapatkan opini TMP, kemudian pada tahun 2019-2022 mendapat opini WDP, meskipun naik setingkat lebih baik dari sebelumnya tetapi pada tahun 2019-2022 tidak mengalami perubahan yang lebih baik dengan mendapatkan opini WTP karena masih ditemukan beberapa catatan pengelolaan aset yang belum tertib dan kas di bendahara terkait pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan ([papua.bpk.go.id](http://papua.bpk.go.id)). Hal ini menunjukkan kurang baiknya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sarmi. Terkait dengan masalah yang sudah diuraikan di atas, catatan dari BPK mengenai pengelolaan aset yang belum tertib ini tidak sesuai dengan dimensi dari kualitas laporan keuangan, yaitu relevan yang di mana informasi yang disajikan tidak tepat waktu. Kemudian masalah yang ditemui mengenai kas di bendahara terkait pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan ini tidak sesuai dengan dimensi andal, karena informasi yang disajikan belum sesuai transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan. Hal ini dapat mempengaruhi laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun belum bisa dikatakan baik.

Berdasarkan permasalahan diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sarmi. Seperti, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang memiliki peran dalam menyusun laporan keuangan. Di dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dikatakan bahwa :

“Pemeriksaan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian dan ketentuan hukum lainnya yang berdampak langsung dan signifikan terhadap pokok/keterangan pokok perkara terdeteksi dengan kepastian yang wajar.”

Hal ini menjelaskan bahwa suatu laporan keuangan dapat dinilai tidak wajar jika ada salah saji material yang disebabkan dari tindakan/kegiatan yang melanggar kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berpengaruh langsung dengan penyajian laporan keuangan. Jika dikaitkan dengan masalah kas di bendahara terkait dengan pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dengan kepatuhan peraturan perundang-undangan, di mana jika suatu laporan keuangan dinilai tidak wajar karena ada salah saji material seperti masalah kas di bendahara yang belum dipertanggungjawabkan disebabkan dari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Sarmi terdapat ketidakpatuhan terkait dengan kas di bendahara berkaitan dengan pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka variabel ini akan membantu dalam memeriksa laporan keuangan apakah sudah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, agar laporan keuangan yang dibuat nantinya dapat menjadi laporan yang berkualitas ([papua.bpk.go.id](http://papua.bpk.go.id)). Selain itu, terdapat faktor pengawasan keuangan daerah.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Tujuan proses pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah adalah untuk menjamin terselenggaranya pemerintah daerah, pengelolaan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah:

“Keuangan Daerah berarti segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang, serta segala sumber kekayaan yang dapat ditetapkan sebagai kekayaan daerah dan berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah.”

Hal ini menjelaskan bahwa jika pengawasan keuangan daerah belum dilakukan sesuai maka akan membuat celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana dan juga ketidaklengkapan data, di mana hal seperti ini akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan masalah yang terdapat pada Kabupaten Sarmi tentang kas di bendahara terkait dengan pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan tidak searah dengan dimensi Andal dari Kualitas LKPD karena informasi yang disajikan belum sesuai dengan transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan karena ada masalah yang berkaitan dengan pengawasan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah ini diharapkan dana yang didapatkan dapat digunakan secara baik untuk kesejahteraan masyarakat dan juga dapat menjadi salah satu hal yang membantu untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyelewengan dana, penyimpangan, dan lain-lain.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengelolaan aset daerah yang juga merupakan salah satu faktor penting dalam menyusun laporan keuangan daerah, di mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa

“Pengelolaan aset milik daerah yaitu suatu rangkaian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mengelola semua aset/kekayaan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang meliputi kegiatan pengelolaan aset milik daerah.”

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa jika dalam suatu laporan ada yang belum sesuai dengan ketentuan, kelengkapan informasi aset dalam laporan keuangan belum disajikan lengkap akan menurunkan tingkat keandalannya. Pada Kabupaten Sarmi masih ditemukan beberapa catatan salah satunya yaitu berkaitan dengan pengelolaan aset yang belum tertib, maka diharapkan dengan adanya pengelolaan aset daerah dimaksudkan agar dapat menunjang pengelolaan aset di Kabupaten Sarmi dengan memerhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam variabel ini sehingga dapat menunjang laporan keuangan agar nantinya bisa mendapat opini yang baik dari BPK ([papua.bpk.go.id](http://papua.bpk.go.id)).

Proses perancangan laporan keuangan melibatkan sistem pengendalian internal.

“Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses berkesinambungan yang dilakukan oleh seluruh pegawai dan atasan untuk memberikan dukungan dalam mencapai tujuan organisasi melalui aktivitas kerja yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang digunakan BPK sebagai alat

penilaian. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, di mana laporan keuangan yang berkualitas diukur dari seberapa baik organisasi melaksanakan sistem pengendalian internalnya. Namun, jika dalam suatu organisasi masih belum optimal dalam menjalankan pemantauan atau kegiatan pengendalian akan menyebabkan laporan keuangan kurang berkualitas, hal ini berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sarmi kemungkinan karena kurangnya dalam pemantauan atau kegiatan pengendalian maka menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sarmi kurang baik, karena masih terdapat masalah yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal, yaitu kas di bendahara terkait pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan pengelolaan aset yang belum tertib. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya sistem pengendalian internal ini pimpinan dan seluruh pegawai dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kompetensi dalam sumber daya manusia adalah faktor lain yang mempengaruhi pembuatan laporan keuangan. Pihak yang memiliki wewenang hanyalah individu yang memenuhi syarat yang harus menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Tenaga kerja dapat digunakan untuk merujuk pada sumber daya manusia. Undang-Undang 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia yang disebut juga tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan baik individu maupun bersama. Setiap pegawai perlu

memiliki kompetensi kerja yang baik. Kompetensi di tempat kerja mengacu pada kemampuan setiap orang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang memenuhi standar yang ditetapkan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja."

Kualitas laporan keuangan akan meningkat apabila sumber daya manusia mengetahui peraturan yang mengatur penyusunannya. Hal ini menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena jika dalam menyusun laporan keuangan dilakukan oleh orang-orang yang kurang cakap akan membuat laporan keuangan kurang berkualitas, berkaitan dengan itu masalah yang ada di Kabupaten Sarmi ini berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten karena masih terdapat masalah kas di bendahara yang belum dipertanggungjawabkan dan pengelolaan aset yang belum tertib. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan dapat menjadi salah satu penyebab laporan keuangan yang dibuat kurang berkualitas. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang kompeten sangat di perlukan dalam menyusun laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (papua.bpk.go.id)

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai kepatuhan peraturan perundang-undangan, pengawasan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Luthfiani dan Sudjana (2022) menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah secara parsial berpengaruh positif serta signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada penelitian kedua yang dilakukan oleh

Rumangun, dkk (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan peraturan perundang-undangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kepulauan Aru.

Selanjutnya penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rahayu dan Dewi (2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Buleleng. Lalu penelitian yang keempat dilakukan oleh Gustina, dkk (2022) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain itu penelitian kelima yang dilakukan oleh Rahayu dan Kanita (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian selanjutnya yang keenam dilakukan oleh Novianti dan Dewi (2023) menunjukkan bahwa variabel kepatuhan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintah, dan



sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Yanti, dkk (2020) menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Lalu penelitian yang kedelapan dilakukan oleh Misnaini, dkk (2023), menyatakan bahwa variabel pengelolaan aset dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

Selanjutnya penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Laksono (2023) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel komitmen organisasi dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang, untuk mendapatkan opini yang baik tidaklah mudah. Oleh karena itu, maksud dari penelitian ini adalah untuk diperhitungkan oleh pemerintah Kabupaten Sarmi dalam rangka mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH KEPATUHAN**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, PENGELOLAAN ASET DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SARMI”.**

**1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah kepatuhan perundang-undangan berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pengelolaan aset daerah berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?

**1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan pada latar belakang , tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepatuhan peraturan perundang-undangan, pengawasan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sarmi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis dan praktik diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi pembaca maupun masyarakat umum tentang pengaruh kepatuhan peraturan perundang-undangan, pengawasan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sarmi. Selain itu, dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, rekomendasi, dan data tambahan yang berguna bagi OPD Kabupaten Sarmi. OPD juga dapat mempertimbangkan temuan-temuan ini sambil meningkatkan kualitas laporannya. Sehingga nantinya bisa mendapat opini dari BPK di masa mendatang dengan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).